



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pandapat
Dengan	: Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Acara	: 1. Perkembangan Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Pasca Operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan tanggal 1 Juli 2015 sampai saat ini. 2. Penjelasan terkait pelaksanaan PP No. 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, PP No. 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun dan PP No. 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 8 September 2015
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Ketua Rapat	: Pius Lustrilanang, SIP, MSi/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd Nusantara I Lt 1 DPR-RI Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. Anggota Komisi IX DPR RI orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI B. Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan RI dibuka pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi

sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR mengapresiasi atas perubahan PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT menjadi PP No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 46 Tahun 2015 yang memberikan kesempatan kepada peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya menerima JHT.
2. Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenakerjaan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta Program JKK, Program JK, Program JP dan Program JHT dalam memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada peserta baik yang mengikuti program *Return to Work* pada Program JKK maupun yang tidak mengikuti program tertentu pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan target kepesertaan dan sosialisasi program jaminan sosial kepada para pekerja yang belum menjadi peserta di daerah-daerah berbasis pekerja/buruh, yang rawan dan mengalami PHK sehingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat ditingkatkan secara signifikan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pelayanan program jaminan pensiun untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan yang diterima peserta dapat dirasakan lebih baik di masa yang akan datang.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini, disampaikan tanggal 17 September 2015.

Rapat diakhiri pukul 13.00 WIB

DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN,



ELVYN G. MASASSYA

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI**



PIUS LUSTRILANANG, SIP, MSi